



Analisis Kebijakan Tentang Manajemen dalam Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia

Sahwi^{1*}, Mahyudin², Muhammad³

^{1,2,3}Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Mataram Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/Goescienceed.v6i2.985>

Received: 11 March 2025

Revised: 27 March 2025

Accepted: 29 March 2025

Corresponding Author:

Email*:

sahwi12@admin.sma.belajar.id

Abstrak: Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa berbagai kebijakan pemerintah selama pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh (PJJ) di Indonesia telah menjadi salah satu alternatif penting dalam menghadapi tantangan pendidikan di tengah keterbatasan akses fisik, terutama di daerah terpencil dan selama pandemi COVID-19. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan manajemen yang diterapkan dalam pelaksanaan PJJ di Indonesia. Melalui pendekatan analisis kebijakan, penelitian ini mengkaji berbagai regulasi yang mendasari pelaksanaan PJJ, termasuk kebijakan yang terkait dengan infrastruktur teknologi, penyediaan materi ajar, pelatihan guru, dan evaluasi hasil belajar. Analisis ini juga mencakup tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan peserta didik dalam menjalankan PJJ, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya yang signifikan dalam mengembangkan kebijakan untuk mendukung PJJ, masih terdapat kendala besar dalam hal aksesibilitas teknologi, kualitas pembelajaran, dan kesenjangan antara daerah urban dan rural. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan PJJ di Indonesia, dengan memperhatikan kebutuhan lokal dan ketersediaan sumber daya.

Kata Kunci: Kebijakan, Manajemen, Pendidikan Jarak Jauh,

Citation: Sahwi, Mahyudin, & Muhammad. (2025). Analisis Kebijakan Tentang Manajemen dalam Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika (GeoScienceEd)* 6(2), 887-891. doi: <https://doi.org/10.29303/Goescienceed.v6i2.985>

Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang dilakukan untuk mengembangkan potensi diri dalam segi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan. Generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya system Pendidikan yang berkualitas. Bashori, (2017) berpendapat bahwa kemajuan suatu bangsa di masa sekarang dan masa mendatang sangat didukung oleh kemajuan dalam bidang Pendidikan. Rahman et al. (2021) menyebutkan bahwa menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan susasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dapat diperoleh dimana saja, bisa diberikan dari orang tua, dari sekolah, maupun dari lingkungan sekitar. Pendidikan sangat penting untuk diberikan dari kecil (Alwi *et al.*, 2022).

Pada tahun 2019 terjadi pandemi Covid-19 yang mengubah tatanan kehidupan manusia di seluruh dunia, tak terkecuali Indoensia. Pada tahun ajaran 2020 sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan secara mendadak. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia (Azzahra, 2020). Efek dari pandemi ini mengakibatkan sistem pendidikan yang awalnya dilakukan dengan tatap muka atau luring (luar jaringan) harus berubah

Email: sahwi12@admin.sma.belajar.id

menjadi sistem pendidikan jarak jauh. Istilah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 yang menyatakan bahwa Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik, dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lainnya Rohani, (2020).

Pendidikan jarak jauh (PJJ) adalah bentuk pendidikan yang tidak mengharuskan kehadiran fisik antara pengajar dan siswa di lokasi yang sama (Zainal, 2020). Pendidikan jarak jauh adalah metode pendidikan yang memanfaatkan teknologi untuk mengatasi batasan geografis dan waktu, memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar bagi siswa. Dengan perkembangan teknologi, PJJ terus berkembang dan menawarkan berbagai peluang untuk pembelajaran yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pembelajaran jarak jauh dapat melalui berbagai platform yang tersedia seperti *Zoom Meeting*, *google meet*, *Google Classroom*, *WhatsApp video* dan masih banyak lainnya. Segala bentuk materi pelajaran di distribusikan secara online, komunikasi dan tes dilakukan secara online (Shattuck, 2023).

Secara empiric realisasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti, pemerintah pusat harus menjamin dengan menyediakan koneksi internet yang lancar dan stabil, subsidi kuota, bantuan perangkat digital dan peningkatan kapasitas digital juga meminimalisir ketimpangan akses di berbagai wilayah (Oktavia, 2020). Hal ini mengharuskan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran secara khusus untuk mendukung lancarnya kegiatan pembelajaran daring tersebut. Meskipun dalam pelaksanaan PJJ terdapat hambatan seperti infrastruktur dan kesiapan teknologi, inisiatif seperti kemitraan publik-swasta dan penggunaan platform e-learning menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan akses pendidikan di seluruh negeri. Adaptasi model pembelajaran yang sesuai dengan budaya lokal juga menjadi kunci keberhasilan implementasi pendidikan jarak jauh di Indonesia (Safiq, 2022).

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode study literatur. Penelitian bertujuan untuk menganalisa kebijakan untuk mengevaluasi dan memahami manajemen dalam pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan PJJ serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan.

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini:

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama: Dokumentasi kebijakan - Mengkaji berbagai dokumen kebijakan yang terkait dengan PJJ, seperti regulasi, peraturan pemerintah, dan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga terkait lainnya. Wawancara - Wawancara dilakukan dengan para pemangku kepentingan, termasuk pejabat pendidikan, pengelola PJJ di lembaga pendidikan, dan guru-guru yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PJJ. Tujuannya adalah untuk memperoleh pandangan langsung tentang tantangan, keberhasilan, dan kekurangan kebijakan yang ada.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan yang mencakup beberapa tahap berikut: a) Deskripsi Kebijakan - Menyajikan gambaran tentang kebijakan yang telah diterapkan terkait PJJ, termasuk tujuannya, sasaran, dan komponen utama kebijakan. b) Identifikasi Masalah - Mengidentifikasi isu dan masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan PJJ, baik dari sisi infrastruktur, kurikulum, atau kesenjangan akses teknologi antara daerah urban dan rural. c) Evaluasi Kebijakan - Menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam menjawab tantangan pelaksanaan PJJ dan pencapaian tujuan pendidikan jarak jauh di Indonesia. d) Rekomendasi Kebijakan - Menyusun rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang dapat meningkatkan keberhasilan PJJ di Indonesia.

Pendekatan Kualitatif Penelitian ini lebih mengutamakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis kebijakan, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap peran dan pengaruh kebijakan dalam pelaksanaan PJJ. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk menemukan pola, isu utama, dan hubungan antar kebijakan yang diterapkan.

Hasil dan Pembahasan Definisi Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang. Pendidikan secara umum mempunyai arti yaitu suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan sehingga menjadi seorang yang terdidik dan menjadi orang yang berguna baik bagi Negara, Nusa dan Bangsa. Pendidikan adalah suatu aktivitas yang berkelanjutan selama hidup dalam rangka mengembangkan kepribadian untuk

memperoleh kecerdasan intelektualitas dan kecerdasan emosional, yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Sedangkan dalam pengertian sempit, pendidikan merupakan suatu aktivitas pembelajaran dan pengajaran yang berlangsung secara formal, terkontrol dan terstruktur dengan ruang lingkup terbatas pada pelembagaan, terbatas pada ruang dan jangka waktu tertentu (Asrofi et al., 2025).

Tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya; mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya; berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya. Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia. Tujuan Pendidikan Nasional, sesuai dengan Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Agama, pendidikan dan kebudayaan, maka dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945. Selanjutnya dalam UU No. 2 tahun 1989 ditegaskan lagi bahwakehidupan bangsa.

Sejak pemerintah menerapkan *sosial distance* untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19, maka terjadi pembatasan pertemuan dengan jumlah banyak termasuk dalam dunia Pendidikan. Hal ini berdampak pada kegiatan belajar-mengajar di lembaga Pendidikan yang semula tatap muka di kelas, bergeser menjadi pendidikan jarak jauh (PJJ) dalam jaringan (daring) dengan sistem online. Carter V Good (1959) memberikan pengertian kebijakan Pendidikan (*educational policy*) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan.

Definisi Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Menurut Sari et al., (2020) analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Kebijakan adalah terjemahan dari kata "policy" dalam bahasa Inggris yang

berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, sehingga penekanannya bertujuh kepada tindakan (produk). Kata kebijakan jika disandingkan dengan pendidikan maka merupakan hasil terjemahan dari kata *educational policy* yang berasal dari 2 kata, sehingga Iswahyudi et al., (2023) mengatakan kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. jadi penulis merumuskan bahwa analisis kebijakan adalah suatu proses evaluasi kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Definisi Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan adalah disiplin yang mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen dalam konteks pendidikan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang mendukung pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola, mengorganisir, dan mengarahkan institusi pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan secara efektif dan efisien (Nurhikmah, 2024).

Fungsi manajemen Pendidikan antara lain sebagai berikut:

Perencanaan: Menetapkan tujuan, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengorganisasian: Mengatur struktur organisasi, pembagian tugas, dan alokasi sumber daya untuk mendukung proses belajar mengajar.

Penggerakan: Memotivasi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan upaya individu dan kelompok dalam mencapai tujuan Pendidikan.

Pengendalian: Memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan sesuai dengan rencana (Nurchahya et al., 2024).

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan

Pelaksanaan merupakan kegiatan integral dari pembentukan kebijakan. Menurut *association for the development of African education* (1996), pelaksanaan merupakan praktik dari kebijakan itu sendiri. Pada tahapan pelaksanaan itulah dapat dilakukan penilaian, monitoring, dan evaluasi terhadap kebijakan dalam rangka mengambil pelajaran dari penerapan kebijakan tersebut. Proses kebijakan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan proses pengambilan keputusan atau kebijakan secara umum, namun dengan memperhatikan sejumlah faktor yang berkaitan erat dengan pendidikan. Menurut tahapan perumusan kebijakan yang dikemukakan oleh Haddad dan Demsky (1995), proses tersebut adalah sebagai berikut:

Menganalisis situasi yang terjadi

Pada bidang pendidikan langkah ini harus mempertimbangkan aspek yang meliputi konteks sosial, politik, demografi, kebudayaan, dan permasalahan sosial yang berpotensi mempengaruhi pengambilan

keputusan hingga proses implementasinya pada sektor pendidikan.

Membuat beberapa pilihan kebijakan

Kebijakan baru biasanya dibuat dalam situasi ketika terjadi permasalahan akibat keputusan politis atau reorganisasi. Pembuatan kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa model tergantung pada situasinya, namun pada kondisi tertentu model-model tersebut dapat digabungkan.

Mengevaluasi pilihan kebijakan

Evaluasi dilakukan terhadap pilihan kebijakan melalui aspek *desirability* (kemenarikan), *affordability* (keterjangkauan), dan *feasibility* (kelayakan). *Desirability* mencakup tiga dimensi yaitu apakah kebijakan tersebut akan mampu menarik dan menguntungkan berbagai kelompok stakeholder, kecocokan dengan ideologi dominan dan target pertumbuhan ekonomi pada rencana pembangunan nasional, serta dampaknya pada perkembangan dan stabilitas ekonomi (Irwan et al., 2021). Aspek *affordability* penting karena pengeluaran pendidikan bersifat lebih rentan terhadap perubahan situasi ekonomi dan politik dibandingkan pengeluaran publik lainnya, sehingga berbagai skenario ekonomi perlu dipertimbangkan. Sedangkan, kelayakan mencakup ketersediaan sumberdaya manusia untuk menerapkan perubahan yang dikandung dalam kebijakan tersebut (Sitepu et al., 2021).

Membuat keputusan tentang Pendidikan

Pengambilan keputusan hingga menghasilkan suatu kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan banyak pertanyaan, menganalisis seberapa jauh atau radikal perbedaan antara kebijakan baru dengan yang lama, dan apakah kebijakan tersebut bersifat operasional.

Merencanakan penerapan kebijakan

Penerapan kebijakan perlu direncanakan dengan baik, karena sebaik apapun antisipasinya penerapan kebijakan selalu membawa kejutan bagi masyarakat dan membentuk respons yang menggambarkan hasil dari kebijakan itu sendiri. Salah satu mengantisipasi dampak penerapan kebijakan adalah dengan *pilot study*.

Menilai dampak penerapan kebijakan

Penilaian dampak kebijakan dilakukan dengan kriteria yang hampir sama dengan tahap evaluasi kebijakan. Proses penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan apa saja dampak dari penerapan kebijakan tersebut, apakah dampak tersebut sesuai dengan harapan, apakah perubahan dapat dijangkau, dan sebagainya.

Menentukan siklus kebijakan selanjutnya

Analisis kebijakan merupakan suatu yang tidak berujung. Idealnya, ketika penerapan kebijakan telah selesai dan hasilnya sudah tampak, tahap penilaian kebijakan akan berlangsung dan mengarahkan pada kemungkinan siklus pembentukan kebijakan yang baru

Kesimpulan

Pendidikan jarak jauh di Indonesia memerlukan manajemen yang efektif dan sistem kualitas yang kuat untuk mengatasi tantangan infrastruktur dan literasi digital. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, pendidikan jarak jauh dapat menjadi solusi yang efektif untuk pendidikan di masa depan.

Referensi

- Alwi, M. H., Nurfaridah, K., Purba, S. A. B., Hati, S. P., & Nasution, F. (2022). Peran pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 13067–13075. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10680>
- Asrofi, I., Agustin, I. R., Cahyati, S. N., Fathkiyah, L., & Toriyono, M. D. (2025). Peran Pendidikan dalam Membangun Toleransi di Lingkungan Pendidikan. *Al Madjid: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 18–29.
- Azzahra, N. F. (2020). *Addressing distance learning barriers in Indonesia amid the Covid-19 pandemic*. <https://hdl.handle.net/10419/249436>
- Bashori, B. (2017). Modernisasi Lembaga Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi Azra. *Nadwa Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2). <https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/653%0A>
- Irwan, I., Ichsan, F. N., Gistituati, N., & Marsidin, S. (2021). Analisis kebijakan pendidikan terkait implementasi pembelajaran pada masa darurat covid 19. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 89–95. <https://doi.org/10.33751/jmp.v9i2.4238>
- Iswahyudi, M. S., Irianto, I., Salong, A., Nurhasanah, N., Leuwol, F. S., Januaripin, M., & Harefa, E. (2023). *Kebijakan dan inovasi pendidikan: Arah pendidikan di masa depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurchaya, A., Zohriah, A., Firdaos, R., & others. (2024). Basic Concepts of Educational Management. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 9(1), 9–20. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v9i1.16479>
- Nurhikmah, N. (2024). Educational management functions: Planning, organizing, actuating, controlling. *INTIHA: Islamic Education Journal*, 1(2), 82–91. <https://doi.org/10.58988/intiha.v1i2.293>
- Oktavia, W. S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid-19. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2).
- Rahman, A., Naldi, W., Arifin, A., & Mujahid, F. (2021). Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional Np 20 Tahun 2003 dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia. *Analisis Uu Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia*, 4(1), 98–107. Retrieved from <http://repository.iaincurup.ac.id/524/>

- Rohani, I. (2020). Kajian Kebijakan Pendidikan Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 1(1), 80-99.
- Safiq, A. (2022). IT dan Pendidikan Distance Education. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2).
- Sari, W., Rifki, A. M., Karmila, M., Dwiyama, F., & Aziz, M. B. (2020). Analisis kebijakan pendidikan terkait implementasi pembelajaran jarak jauh pada masa darurat covid 19. *Jurnal Mappesona*, 3(2). <https://doi.org/10.30863/mappesona.v3i2.830>
- Shattuck, K. (2023). Reminiscences: The Origin of the Term "Distance Education." *American Journal of Distance Education*, 37(3), 165-168. <https://doi.org/10.1080/08923647.2023.2238387>
- Sitepu, F. R., Sitepu, D. S., Simanjuntak, E. E., & others. (2021). Implementasi Pembelajaran Daring terhadap Kemandirian Belajar Selama Pembelajaran Jarak Jauh Dimasa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional PBSI-IV Tahun 2021 Tema: Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia Berbasis Digital Guna Mendukung Implementasi Merdeka Belajar*, 209-216. <https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/43402>
- Zainal, N. H. (2020). Tantangan kebijakan pembelajaran jarak jauh di era pandemi Covid 19. *PENCERAHAN*, 14(2), 133-151.